

**RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN TAHUN 2024**



**KECAMATAN NGAMBON
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good Governance* yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, *rule of law profesionalisme*, efektivitas dan efesiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat Pemerintahan Daerah. Terkait dengan hal tersebut Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan Pemerintah Daerah Otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggungjawab Camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya masyarakat dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam Perencanaan Pembangunan, Masyarakat dan Pemerintahan tingkat Kecamatan, Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Bupati.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Strategis yang dikenal dengan (RENSTRA) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 yang meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ngambon

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan perda tentang rencana RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah.
13. SE Bupati Bojonegoro No : 050/3942/412.302/2022 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngambon Tahun 2024 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Ngambon guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kinerja Kecamatan Ngambon tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bojonegoro khususnya Kecamatan Ngambon;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat

1.4 Sistematika Penulisan

Laporan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar.

Daftar Isi.

I. PENDAHULUAN.

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penyusunan.

II. HASIL EVALUASI RENJA-PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Ngambon;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngambon;

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ngambon;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

V. PENUTUP.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, oleh karena itu Renja Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal yaitu :

1. Kebijakan perencanaan program dan kegiatan;
2. Pelaksanaan rencana program dan Kegiatan;
3. Hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah - masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran - sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan - kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Ngambon Tahun 2023 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD
Dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023
Kabupaten Bojonegoro

Nama PD: Kecamatan Ngambon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	0	0	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %
	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	0	0	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	3 Dokumen		100 %

	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	0	0	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen		100 %
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang lengkap administrasi	0	0	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %			100 %
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	0	0	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %			100 %
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	0	0	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %			100 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	0	0	6 Layanan	6 Layanan	100 %			100 %
	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	0	0	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %			100 %
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	0	0	100 %	100 %	100 %			100 %
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di kecamatan	Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilaksanakan	0	0	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %			100 %
	Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	0	0	1 Kali	1 Kali	100 %			100 %

	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	0	0	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %			100 %
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	0	0	100 %	100 %	100 %			100 %
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	0	0	2 Kali	2 Kali	100 %			100 %
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan	0	0	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %			100 %
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	0	0	100 %	100 %	100 %			100 %
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi yang dilakukan	0	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %			100 %
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penetapan Perda dan Perkada	Jumlah koordinasi yang dilakukan	0	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %			100 %
7.01.06	PROGRAM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	0	0	100 %	50	50 %			100 %

	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilakukan	0	0	8 Kegiatan	4 keg	50 %			100 %
--	--	---	---	---	------------	-------	------	--	--	-------

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Ngambon dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- ✓ Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- ✓ Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur;
- ✓ Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Ngambon meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal.

a. Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas;
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
- Adanya alokasi anggaran bagi Kecamatan;
- Kewenangan koordinasi di tingkat Kecamatan;
- Adanya sarana dan prasarana.

b. Kelemahan

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai;
- Karena letak Kecamatan Ngambon jauh dari Pusat Pemerintahan Kabupaten maka pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan Kabupaten dan instansi teknis lainnya mengalami kendala;
- Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi;
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
- Kurangnya Pegawai di lingkup Kec. Ngambon sehingga kurang optimalnya pelaksanaan tugas.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- RPJM Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2023
- Agenda pembangunan tahunan Kabupaten Bojonegoro;
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan;
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik;
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan Kecamatan;
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas;
- Diklat peningkatan kualitas aparatur;
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat;
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram;

b. Ancaman :

- Jarak yang jauh dari ibu kota kecamatan ke desa-desa;
- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai;
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan;
- Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya;
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat;
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajibanyang mengikat;
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro serta Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro yaitu untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melakukan perencanaan pembangunan yang berbasis kemasyarakatan, sekaligus melakukan pelaporan pembangunan, dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan PD dan instansi terkait.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Ngambon Tahun 2024, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja

pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Ngambon. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ngambon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngambon
Kabupaten Bojonegoro

No.	Indikator	SPM/Stand ard Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Tata Usaha Gaji Pegawai dan Tunjangan dalam satu tahun	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
2.	Persentase Jumlah jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
3.	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
4.	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	34,50%	100%	100%	100%	-
5.	Persentase Penyediaan Makan dan Minum Harian Pegawai dalam satu tahun	-	-	100%	100%	100%	100%	25,00%	100%	100%	100%	-
6.	Persentase Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan dalam satu tahun	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
7.	Persentase Penyusunan Laporan Semesteran	-	-	100%	100%	100%	100%	25,00%	100%	100%	100%	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Bojonegoro dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan yang meliputi aspek fisik-lingkungan, social-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan.

3.1.1 Penelaahan Isu Strategis Nasional.

a. Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2020

Review terhadap RPJMN bertujuan untuk mengetahui arah pembangunan nasional dan sasaran pembangunan pada setiap tahun. Pemahaman terhadap arah dan sasaran pembangunan jangka panjang nasional akan memandu RPJMD Kabupaten Bojonegoro agar selaras dengan cita-cita bersama seluruh rakyat Indonesia.

Visi RPJMN 2015-2020 adalah :

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

yang akan dicapai dengan 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut:

- ✓ Mewujudkan keamanan Nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

- ✓ Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- ✓ Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- ✓ Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- ✓ Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- ✓ Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan Nasional;
- ✓ Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan;

b. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2022.

Dimensi Pembangunan Manusia.

Sasaran.

- ✓ Revolusi Mental;
- ✓ Kesehatan;
- ✓ Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Penekanan

- ✓ Pengarusutamaan Revolusi Mental dalam setiap prioritas dan kegiatan pembangunan.
- ✓ Mempertahankan anggaran pendidikan dan kesehatan masing-masing 20% APBN dan 5 % APBN (kebijakan pokok antara lain distribusi guru yang merata yang sekaligus akan mengendalikan biaya gaji dan tunjangan guru yang saat ini sudah sekitar separuh anggaran pendidikan).
- ✓ Melanjutkan pembangunan perumahan yang sudah dimulai di APBNP 2015 dengan program sejuta rumah.

Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan.

Sasaran.

- ✓ Kedaulatan Pangan;
- ✓ Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan;

- ✓ Kemaritiman dan Kelautan;
- ✓ Pariwisata;
- ✓ Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Penekanan.

- ✓ Penekanan Sektor Unggulan sudah dimulai sejak APBN - P 2015;
- ✓ Kedaulatan Pangan (terutama anggaran Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Penyertaan Modal Negara);
- ✓ Kedaulatan Energi (terutama melalui Penyertaan Modal Negara);
- ✓ Kemaritiman dan Kelautan (Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Penyertaan Modal Negara);
- ✓ Pariwisata, Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri, akan mendapat penekanan lebih lanjut dalam RKP 2018 terutama pengembangan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri dan pariwisata.

Dimensi Pemerataan Antar Pendapatan Dan Wilayah.

Sasaran.

- ✓ Pemerataan Antar kelompok Pendapatan;
- ✓ Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal;
- ✓ Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- ✓ Pengembangan Konektivitas Nasional;
- ✓ Reforma Agraria.

Penekanan

- ✓ Menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dalam kondisi perekonomian yang masih tumbuh antara 5-6% melalui peningkatan penerima Bantuan Tunai Bersyarat dalam RKP 2020 dan mempertahankan dukungan untuk mengurangi beban penduduk miskin dan rentan;

- ✓ Reformasi agraria ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian hak milik atas tanah yang meliputi redistribusi tanah dan legalisasi aset redistribusi tanah seiring dengan meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah;
- ✓ Pembangunan kawasan perbatasan difokuskan pada 2 (dua) sasaran pembangunan yaitu meningkatkan pertahanan dan keamanan serta pengembangan pusat ekonomi perbatasan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- ✓ Pengurangan kesenjangan secara tegas diamanatkan Nawacita ke tiga dengan membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta pengentasan daerah tertinggal. Pembangunan Indonesia (Indonesia sentris) lebih diutamakan dibandingkan pembangunan di Jawa (Jawa Sentris), walaupun RoI lebih tinggi di Jawa. Pendulum pembangunan harus banyak bergerak ke luar Jawa;
- ✓ Menekankan konektivitas antar wilayah dalam RKP 2021 pada penyelesaian proyek-proyek yang akan menurunkan biaya logistik dan mendukung pembangunan kawasan;
- ✓ Infrastruktur menjadi motor penggerak pembangunan untuk mendorong masuknya investor dengan penguatan sektor riil, sehingga akan mempermudah pencapaian cita-cita dalam membangun tol laut, karena arus barang dan jasa dari jalur tol laut akan terisi penuh (orang dan barang-barang produksi lokal).

Kondisi Perlu (Polhukhankam).

Sasaran.

- ✓ Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Penekanan

- ✓ Memenuhi secara bertahap Minimum Essential Forces dengan peran industri pertahanan dalam negeri yang makin meningkat;
- ✓ Memantapkan penegakan hukum;
- ✓ Memantapkan reformasi birokrasi;
- ✓ Memantapkan konsolidasi demokrasi melalui penguatan aspek-aspek demokrasi termasuk komunikasi dan informasi publik serta

menguatkan efektivitas diplomasi dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan, perlindungan WNI/BHI, pelaksanaan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan, termasuk kerjasama selatan-selatan dan triangular.

Penelaahan Isu-Isu Strategis Kabupaten.

Dengan memperhatikan hasil penelaahan isu-isu strategis nasional maupun internasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Timur, dan Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, maka Isu Strategis Jangka Menengah Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut:

- a. Isu pangan** yaitu : meningkatkan peran Bojonegoro sebagai lumbung pangan negeri dengan mendorong semua program pertanian, peternakan dan yang terkait guna meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian (pertanian bahan makanan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan) untuk meningkatkan ketahanan pangan dan penyediaan surplus pangan, serta peningkatan keanekaragaman pangan dari bahan pangan asli Bojonegoro;
- b. Isu energi** yaitu : mendukung dan membantu Pemerintah Pusat terkait peningkatan produksi migas, peningkatan kontribusi energi dan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
- c. Isu wisata, industri, manufaktur dan jasa**, yaitu : pengembangan dan pengoptimalan 13 kawasan industri dan pariwisata, meningkatkan nilai tambah pada semua mata rantai produksi bidang industri, pertanian dan jasa dan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing, mempersiapkan sektor kesehatan dan pendidikan sebagai jasa unggulan, mengembangkan industri kreatif pariwisata berbasis event (ekonomi, olahraga, seni dan budaya) berbasis alam dan pengembangan desa wisata;
- d. Isu pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan**, yaitu : solusi dan penanganan banjir dan kekeringan secara tepat, penanganan bencana longsor dan anomali iklim melalui sistem pengelolaan air terpadu (pembangunan waduk, bendung gerak, embung, sumur resapan, biopori, pompanisasi, normalisasi sungai dan drainase kota) serta keterpaduan

holistik PD dan pemangku kepentingan, juga pengelolaan sampah secara tepat dan ekonomis;

- e. **Isu reformasi birokrasi, modal sosial dan modal manusia**, yaitu : meningkatkan pelayanan prima pada semua perangkat pelayanan publik, yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi. Mendorong partisipasi aktif semua pemangku kepentingan dalam pembangunan Bojonegoro, meningkatkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan melalui pelaksanaan jaminan sosial dan kesehatan (JKN, KIS, Jamkesda), pendidikan (Bidik misi, DAK Pendidikan, Program satu desa dua Sarjana). Mengimplementasikan prinsip kabupaten welas asih pada semua aspek pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik;
- f. **Isu pengelolaan ketertiban hukum dan sosial**, yaitu : mengembangkan informasi publik yang transparan dan aspiratif, meningkatkan kerjasama dalam segala bidang peningkatan kesejahteraan dan keamanan rakyat baik dengan pemerintah daerah lain, swasta, perguruan tinggi, lembaga donor dan pemangku kepentingan lainnya. Meningkatkan keselarasan pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan daerah;
- g. **Isu pembangunan desa lewat gerakan desa sehat dan cerdas**, yaitu sebagai bentuk dari desa membangun dan membangun Indonesia dari pinggiran. Dengan 20 Indikator yang ada dalam GDSC maka dapat sebagai landasan penyusunan program, kegiatan dan penganggaran di desa. Dalam penerapannya sebagai spirit utama pembangunan berkelanjutan(sustainable development) pada 6 pilar pembangunan Bojonegoro;
- h. **Isu pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan**, yaitu : melaksanakan program-program dalam mendukung pencapaian target nasional, melaksanakan program yang pro poor, pro growth, pro job dan pro environment;
- i. **Isu infrastruktur**, yaitu : pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur secara nasional, baik terkait infrastruktur, jalan, jembatan, gedung pemerintahan, taman dan sarana publik lainnya, dengan di gulirkannya Program Pemkab berupa BKD untuk pembangunan Infrastruktur Jalan;

- j. **Isu anggaran**, yaitu : melaksanakan program yang bersifat mengikat dalam rangka pemenuhan peraturan pembangunan, meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Mengoptimalkan penerimaan dana bagi hasil migas untuk membiayai program prioritas dan investasi produktif, aman dan berkelanjutan melalui pembentukan dana abadi migas.

Dalam perencanaan pembangunan Bojonegoro.baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah dirancang dengan semangat melawan kutukan sumberdaya alam dan wujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal ini tercermin pada enam pilar pembangunan berkelanjutan, antara lain:

1. Pilar pembangunan ekonomi.

Menempatkan bidang ekonomi pada nomor pertama bukan tanpa maksud.Bila kita ingin wujudkan kesejahteraan, kebahagiaan bersama secara berkelanjutan, kunci pertamanya adalah segenap rakyat Bojonegoro memiliki pendapatan yang meningkat secara berkelanjutan. Karena itu fokus kebijakan ekonomi adalah bagaimana menjadikan Bojonegoro sebagai kawasan yang seluruh rakyat dapat melakukan aktivitas ekonomi, mendapatkan kesempatan beraktivitas yang dapat menyebabkan pendapatan berkelanjutan. Kaitannya dengan migas, bagaimana menjadikan kesempatan eksplorasi dan eksploitasi migas untuk kesempatan pekerjaan, bisnis dan menciptakan peluang ekonomi disektor non migas, terutama pertanian, jasa, dan manufaktur.

2. Pilar Lingkungan hidup.

Aktivitas ekonomi memerlukan dukungan lingkungan hidup yang sehat, sehingga kelak terwujud Bojonegoro sebagai kawasan yang nyaman untuk hidup, bermain, kerja, ibadah dan belajar.Lingkungan Hidup Bojonegoro yang berkualitas dan SDM yang sehat produktif.

Pembangunan lingkungan hidup Bojonegoro diarahkan: dalam rangka mengurangi sumber kerusakan, memperbaiki kerusakan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan. Implementasinya antara lain: Revisi tata ruang, kewajiban Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan Analisis Masalah Dampak

Lingkungan (AMDAL) dalam setiap industri, penegakan hukum, gerakan penanaman pohon, gerbang bersinar Bojonegoro, pembuatan biopori, embung, infrastruktur irigasi, jalan paving, festival Bengawan Solo, grebeg berkah Bojonegoro, dan lainnya.

3. Pilar Modal manusia dan modal sosial.

Perubahan dari pertanian ke sektor lainnya dengan terus memperbaiki kualitas lingkungan hidup memerlukan dukungan sosial dan sumberdaya manusia. Dukungan sosial yang proaktif dan kondusif, saling percaya, terbuka terhadap kemungkinan baru. Manusia Bojonegoro harus menjadi sumberdaya yang produktif, karena harus sehat lahir batin, sehat fisik dan karakter ketakwaannya, inovatif dan kreatif dan berwasanan lingkungan hidup. Orang-orang Bojonegoro dengan kualitas semacam inilah yang kelak akan melahirkan berbagai terobosan wujudkan keunggulan Bojonegoro, bahkan melebihi apa yang kita bayangkan saat ini.

Untuk inilah program pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, ketahanan dan kesatuan bangsa dilakukan. Fokusnya terwujudnya modal budaya, dan modal sosial bagi seluruh rakyat Bojonegoro. Beberapa programnya antara lain: perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan secara merata, peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan kesehatan, pembukaan program dan jenis pelatihan ketrampilan yang relevan bagi rakyat, kerjasama dalam dan luar negeri, peningkatan kompetensi organisasi sipil dan pemberdayaan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau ada mengistilahkan sebagai Non Government Organization (NGO) untuk mendukung pembangunan Bojonegoro, melalui kiprah masing-masing serta pelatihan tenaga kerja vocational dengan jumlah 12.000 orang guna meningkatkan ketrampilan masyarakat Bojonegoro (no one left behind).

4. Pilar Kebijakan fiskal berkelanjutan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Bojonegoro akan memperoleh kenaikan pendapatan dari dana bagi hasil migas, dan kemungkinan bagian hasil bisnis Participating Interest. Namun bukan berarti tanpa masalah.

Pertama, masalah fluktuasi pendapatan, hal ini dipengaruhi tiga hal: harga internasional migas yang dapat naik turun drastis, kenaikan dan penurunan lifting yang sepenuhnya bukan dalam kewenangan

Bojonegoro, keadaan politik pusat. Acapkali situasi nasional membuat para pemimpin pusat menunda transfer pembagian dana bagi hasil. Keadaan ini sudah beberapa kali dialami Bojonegoro dan berakibat pada hampir gagal bayar pada sejumlah proyek yang dilaksanakan. Dari sisi pendapatan ini, maka Bojonegoro harus hati-hati dalam membuat estimasi pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Apalagi Undang - Undang di Indonesia mengatur bahwa daerah yang berpendapatan tinggi, tidak mendapatkan DAK dan DAU akan dikurangi bisa sampai nol.

Kedua yang dihadapi Bojonegoro, bagaimana dalam ketidakpastian pendapatan seperti itu dapat mengalokasikan anggarannya secara tepat dan berimplikasi pada kemampuan Bojonegoro membiayai pembangunan secara berkelanjutan.

Dalam rangka itulah maka kebijakan penganggaran Bojonegoro dilaksanakan:

- a. Belanja fokus pada hal yang mendasar: pengembangan SDM yang sasarannya menjadikan rakyat Bojonegoro sehat lahir batin dan produktif, Belanja SDM untuk menciptakan daya saing daerah meningkat, Pembangunan modal sosial, pembangunan infrastruktur yang relevan untuk menopang strategi pembangunan ekonomi dan SDM.
- b. Dalam rangka mewujudkan kemampuan fiskal berkelanjutan Bojonegoro memilih jalan:
 - ✓ Dalam mengelola APBD, saat pendapatan migas naik turun tajam, Bojonegoro memilih membiarkan sisa hasil pendapatan (SiLPA) lebih besar, sehingga sewaktu waktu DBH Migas tidak terealisasi secara teknis sudah ada dana segar yang menjadi cadangan;
 - ✓ Menginvestasikan disektor keuangan, penempatan pendapatan daerah pada sektor perbankan ini, selain dimaksudkan untuk investasi sekaligus dimaksudkan untuk mendorong iklim usaha bagi rakyat Bojonegoro. Jumlah modal disetor dapat saja terus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi dan kemampuan rakyat Bojonegoro;

- ✓ Membentuk dana abadi. Dana abadi dimaksudkan untuk mengantisipasi masa dimana DBH yang diperoleh Bojonegoro tidak lagi cukup untuk membiayai pembangunan. Dari daerah kategori fiskal tinggi menjadi rendah. Karena itulah maka diperlukan dana abadi yang kelak keuntungannya dapat digunakan untuk membiayai fokus utama pembangunan Bojonegoro, yaitu manusia Bojonegoro.

5. Pilar Pemerintahan yang cerdas, baik dan bersih (Good Goverment).

Untuk menjalankan pilar ekonomi, lingkungan hidup, modal manusia dan modal sosial, menjalankan kebijakan fiskal yang benar diperlukan adanya pemerintahan yang kuat, cerdas, sehat, bersih dan proaktif terhadap segala dinamika masyarakat, pengusaha, kelompok sipil dan kekuatan politik.

6. Pilar Kepemimpinan transformatif.

Secara sadar Bojonegoro perlu mempromosikan, mewujudkan dan menjaga kepemimpinan tranformatif pada kepemimpinan politik, sosial, bisnis dan birokrasi. Kepemimpinan transformatif adalah kepemimpinan yang menggerakkan dan mengelola perubahan secara terus menerus.

Untuk menjalankan lima misi elemen pembangunan keberlanjutan Bojonegoro tidak dapat dikelola dengan kepemimpinan yang semata-mata berorientasi pada status quo, status harmonis. Sebaliknya tranformasi harus dikelola dengan pendekatan dinamis harmonis. Khusus tentang terwujudnya kepemimpinan transformatif ini maka parta politik, ormas, dan organisasi sipil harus ikut mengambil tanggung jawab, karena disitulah praktek kepemimpinan dijalankan, namun dari situ jugalah sumber kepemimpinan dilahirkan.

Pemerintah sekedar bertugas memfasilitasi segenap proses komunikasi transformatif antar elemen rakyat. Berdasar pada skenario enam pilar, implementasi **SDGs** dan enam elemen tranformasi Bojonegoro. Inilah hal hal yang perlu mendapatkan perhatian serius:

- ✓ Industri migas sudah mencapai puncak, namun uangnya tidak sebanyak yang kita bayangkan, maka harus cermat menggunakannya;

- ✓ Sektor pertanian, peternakan dan perkebunan tetap menjadi andalan utama kehidupan rakyat Bojonegoro dengan mengoptimalkan produktivitas dan NTP harus menjadi perhatian utama. Komoditas baru yang lebih menguntungkan harus diimplementasikan, seperti sorgum. Kalau tanaman jambu sudah berbuah, maka industri sudah boleh disiapkan;
- ✓ Sektor jasa, industri dan wisata, sebagai andalan baru harus kita percepat dan perkuat pondasinya: produk, sumberdaya manusia dan infrastruktur. Era baru ekonomi Bojonegoro sudah dimulai, industri padat modal, teknologi, padat karya sudah terjadi. Harus terus kita akselerasikan semua potensi yang menjadi daya saing Bojonegoro;
- ✓ Kebutuhan perumahan dan industri meningkat namun kualitas lingkungan hidup harus kita wujudkan. ruang terbuka hijau harus cukup. Kerusakan lingkungan harus diperbaiki, semua penyebab kerusakan harus dicegah. Maka RDTR yang disusun dengan partisipatif yang kelak menjadi dasar kemudahan perijinan harus tuntas.
- ✓ Modal manusia dan modal sosial, target lama belajar 12 tahun harus sukses, ketrampilan anak anak Bojonegoro harus naik kelas untuk mewujudkan Wong jonegoro sehat, cerdas, produktif dan bahagia harus terwujud semakin nyata. Suasana gotong royong, toleransi sosial, saling percaya dan solidaritas yang menjadi kunci terwujudnya ketertiban, keamanan dan keadilan harus kita perkuat;
- ✓ Seluruh aparatur dari Pemerintah Kabupaten hingga pemdes harus menjadi kekuatan utama dari kerja birokrasi yang proaktif, kerja tepat, cepat dan bermanfaat, mampu menjadi solusi bagi semua masalah pembangunan berkelanjutan. Perbaiki sistem kerja, penggunaan IT dan pengendalian dan pengawasan agar terus disempurnakan;
- ✓ Investasi di sektor keuangan dan pembentukan dana abadi akan tetap menjadi tonggak penting bagi keberlanjutan stabilitas fiskal bojonegoro dalam jangka panjang, oleh karenanya jangan mudah tergoda untuk belok jalur dari skenario jalan mendaki.
- ✓ Dalam memantapkan terwujudnya kepemimpinan transformatif dan kematangan demokrasi di Bojonegoro, maka pendidikan politik yang

bertumpu pada gagasan dan program pro pembangunan berkelanjutan jangan dianggap tabu, dengan mendorong seluruh kekuatan politik dan elemen masyarakat madani turut berpartisipasi secara bertanggungjawab dan produktif.

Penetapan sasaran organisasi di dasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai Visi dan Misi RPJMD. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kabupaten Bojonegoro dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya daerah dan kemampuan yang dimiliki baik aktual maupun potensial.

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kabupaten Bojonegoro serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai. Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2020 difokuskan untuk pemenuhan SPM dan upaya menangani permasalahan pembangunan yang prioritas dan mendesak untuk ditangani antara lain masalah Banjir, Kekeringan, dan Konektivitas antar Wilayah. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bojonegoro tidak dapat diatasi sekaligus dalam tempo singkat, sehingga memerlukan upaya yang terus menerus dan konsisten serta didukung pendanaan yang memadai. Untuk itu alokasi pendanaan di bidang FisikInfrastruktur perlu ditingkatkan mengingat proyek fisik tersebut diatas rata-rata adalah proyek multiyears yang memerlukan kesinambungan selama periode lima tahun kedepan untuk memastikan penanganan masalah dan target sasaran dilakukan dengan tuntas.

Berdasarkan urgensi dimaksud maka keterkaitan Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD 2020-2023 dengan target indikator kinerja, strategi dan program prioritas pembangunan pada RKPD tahun 2024, dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana strategis

maka Kecamatan Ngambon mempunyai tujuan : Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial dengan sasaran terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Ngambon secara Optimal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi periode 2018-2023 ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Ngambon mempunyai tujuan : Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial dengan sasaran terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Ngambon secara Optimal.

3.3. Program Dan Kegiatan.

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Ngambon maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- ✓ **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
 - Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
 - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat

- ✓ **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

✓ **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

✓ **PROGRAM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

BAB IV

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN PD**

Adapun rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada bagian perumusan program dan kegiatan, dapat dilihat pada tabel berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. BOJONEGORO TAHUN 2024																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN NGAMBON								2.915.639.674,00	3.365.615.198,00	3.119.681.203,00	204.041.529,00						2.889.389.674,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.915.639.674,00	3.365.615.198,00	3.119.681.203,00	204.041.529,00							2.889.389.674,00	
	7.01	KECAMATAN							2.915.639.674,00	3.365.615.198,00	3.119.681.203,00	204.041.529,00							2.889.389.674,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				100 100 % %	-	2.692.129.974,00	3.156.853.198,00	2.821.078.703,00	0,00							2.692.129.974,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				13 Dokumen	-	2.450.000,00	2.765.000,00	2.765.000,00	315.000,00			-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab	-		2.450.000,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	300.000,00	395.000,00	395.000,00	95.000,00	Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			300.000,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	650.000,00	395.000,00	395.000,00	-255.000,00	Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			650.000,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	395.000,00	395.000,00	95.000,00	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			300.000,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	395.000,00	395.000,00	95.000,00	Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			300.000,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	395.000,00	395.000,00	95.000,00	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			300.000,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	395.000,00	395.000,00	95.000,00	Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			300.000,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	395.000,00	395.000,00	95.000,00	Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			300.000,00	KECAMATAN NGAMBON	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun				12 Laporan	12 Laporan	2.513.982.494,00	2.957.884.518,00	2.584.218.530,00	70.236.036,00			-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab	-		2.513.982.494,00	KECAMATAN NGAMBON	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	0 Orang/bulan	2.431.942.494,00	2.822.494.518,00	2.448.828.530,00	16.886.036,00	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			2.431.942.494,00	KECAMATAN NGAMBON	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	80.840.000,00	134.280.000,00	134.280.000,00	53.440.000,00	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			80.840.000,00	KECAMATAN NGAMBON	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				36 Dokumen	36 Dokumen	600.000,00	470.000,00	470.000,00	-130.000,00	Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			600.000,00	KECAMATAN NGAMBON	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	640.000,00	640.000,00	40.000,00	Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			600.000,00	KECAMATAN NGAMBON	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun				1 Laporan	1 Laporan	16.000.000,00	11.297.300,00	19.462.000,00	3.462.000,00			-	- -	-		16.000.000,00	KECAMATAN NGAMBON	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	16.000.000,00	11.297.300,00	19.462.000,00	3.462.000,00	Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			16.000.000,00	KECAMATAN NGAMBON	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun				5 Laporan	5 Laporan	66.123.800,00	83.648.164,00	107.815.864,00	41.692.064,00			-	- -	-		66.123.800,00	KECAMATAN NGAMBON	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	600.000,00	586.000,00	586.000,00	-14.000,00	Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			600.000,00	KECAMATAN NGAMBON	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	16.000.000,00	28.631.600,00	27.479.400,00	11.479.400,00	Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			16.000.000,00	KECAMATAN NGAMBON	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	24.963.800,00	24.940.100,00	25.412.000,00	448.200,00	Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			24.963.800,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.600.000,00	2.053.464,00	2.053.464,00	-1.546.536,00	Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			3.600.000,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20.960.000,00	27.437.000,00	52.285.000,00	31.325.000,00	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			20.960.000,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan				2 Jenis	2 Jenis	57.364.360,00	61.760.916,00	61.760.916,00	4.396.556,00			-	- -	-		57.364.360,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	27.047.544,00	27.044.100,00	27.044.100,00	-3.444,00	Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			27.047.544,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	13 Laporan	30.316.816,00	34.716.816,00	34.716.816,00	4.400.000,00	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			30.316.816,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan				12 Unit	12 Unit	36.209.320,00	39.497.300,00	45.056.393,00	8.847.073,00			-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab	-		36.209.320,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	28.278.320,00	33.438.700,00	41.156.393,00	12.878.073,00	Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			28.278.320,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	5.850.000,00	4.630.000,00	3.900.000,00	-1.950.000,00	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			5.850.000,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	2.081.000,00	1.428.600,00	0,00	-2.081.000,00	Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			2.081.000,00	KECAMATAN NGAMBON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan				100 %	100 %	153.750.000,00	156.144.700,00	204.904.700,00	0,00							153.750.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan tsb dilaksanakan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	23.750.000,00	31.144.700,00	79.904.700,00	56.154.700,00		-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab	-			23.750.000,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	1.240.000,00	50.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			15.000.000,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-	0 Laporan	8.750.000,00	29.904.700,00	29.904.700,00	21.154.700,00	Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			8.750.000,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	130.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	-5.000.000,00			-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab	-		130.000.000,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			130.000.000,00	KECAMATAN NGAMBON
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/ kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan				100 %	100 %	15.484.900,00	14.865.800,00	61.465.800,00	0,00							15.484.900,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan				1 kali	1 kali	15.484.900,00	14.865.800,00	61.465.800,00	45.980.900,00			-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab	-		15.484.900,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15 Lembaga K emasyarak atan	15 Lembaga K emasyarak atan	15.484.900,00	14.865.800,00	11.465.800,00	-4.019.100,00	Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			15.484.900,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN NGAMBON
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan				100 %	100 %	17.500.000,00	14.428.700,00	14.428.700,00	0,00							17.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	8.750.000,00	7.813.700,00	7.813.700,00	-936.300,00			-	- -	-		8.750.000,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	8.750.000,00	7.813.700,00	7.813.700,00	-936.300,00	Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			8.750.000,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang dilakukan				1 kali	1 kali	8.750.000,00	6.615.000,00	6.615.000,00	-2.135.000,00			-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab	-		8.750.000,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	8.750.000,00	6.615.000,00	6.615.000,00	-2.135.000,00	Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			8.750.000,00	KECAMATAN NGAMBON
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi				100 %	100 %	36.774.800,00	23.322.800,00	17.803.300,00	-26.250.000,00							10.524.800,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi yang dilakukan				3 kali	3 kali	36.774.800,00	23.322.800,00	17.803.300,00	-18.971.500,00			-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab	-		10.524.800,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	26.250.000,00	8.708.300,00	8.708.300,00	-17.541.700,00	Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			0,00	KECAMATAN NGAMBON
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				12 Dokumen	13 Dokumen	10.524.800,00	14.614.500,00	9.095.000,00	-1.429.800,00	Kab. Bojonegoro, Ngambon, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			10.524.800,00	KECAMATAN NGAMBON
		J U M L A H							2.915.639.674,00	3.365.615.198,00	3.119.681.203,00	804.141.004.816,00						2.889.389.674,00		

BAB V

PENUTUP

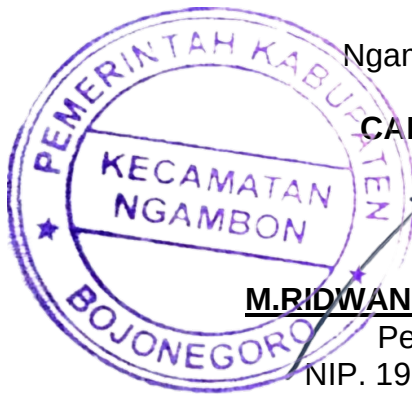
Dengan disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Ngambon ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pelaksana kegiatan di Kecamatan Ngambon dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Disamping itu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Ngambon dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Bojonegoro di Kecamatan Ngambon. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Ngambon. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Ngambon ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Bojonegoro secara keseluruhan. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024 atau tahun ke-1 periode Renstra 2024-2026 maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat

keberhasilan pelaksanaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja yang telah dibuat;

- 5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Untuk itu kami mengharapkan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk sungguh-sungguh melaksanakan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini, sehingga dapat tercapai upaya mengatasi permasalahan di lingkungan Kecamatan Ngambon serta sebagai upaya pendukung menjadikan Masyarakat Kecamatan Ngambon dengan desa yang seluruh warganya sehat, cerdas dan bahagia dan aparatur pelayanan publik yang memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan bermanfaat bagi rakyat.



Ngambon, 31 Juli 2024

CAMAT NGAMBON

M.RIDWAN SAYYADI, S.Sos., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19690119 199003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN NGAMBON

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor : 402

Email : ngambon@bojonegorokab.go.id

NGAMBON

KEPUTUSAN CAMAT NGAMBON
KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 188/ *14* /KEP/412.421/2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN NGAMBON
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024
CAMAT NGAMBON
KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029.
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro.

- Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 TentangT ahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- 11)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro;
- 13) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Ngambon Kabupaten Bojonegoro tentang Penetapan rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ngambon tahun 2024-2026 dan Dokumen rencana Kerja Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi peraturan kepala Derah

KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 disusun sebagaimana dalam lampiran adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Ngambon.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGAMBON

Pada tanggal : 31 Juli 2024

CAMAT NGAMBON



M. Ridwan Sayyadi, S.Sos., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690119 199003 1 005